

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA KAWA KECAMATAN SERAM BARAT

Oleh

Ali Hadi La Dimuru

STIA Abdul Azis Kataloka Ambon

Email: hadiladimuru02@gmail.com

Article History:

Received: 23-08-2024

Revised: 09-09-2024

Accepted: 24-09-2024

Keywords:

Implementasi Kebijakan,
Pembangunan,
Pemberdayaan.

Abstract: Sejak era reformasi, pembangunan desa menjadi skala prioritas dalam rangka percepatan tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip otonomi daerah sebagai instrument peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat khususnya masyarakat perdesaan. Namun, kewenangan yang luas yang diberikan kepada pemerintah desa dan masyarakat perdesaan membutuhkan pendampingan yang optimal agar pelaksanaan pembangunan di desa dapat berjalan dengan maksimal. Oleh karena itu perlu adanya implementasi kebijakan program pembangunan dan pemberdayaan yang merupakan tahap yang sangat menentukan keberhasilan program dalam menyentuh sendi kehidupan masyarakat yang ada di pedesaan. Penelitian ini menggunakan deskriptif dengan sumber data adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi, teknik analisis data yang digunakan adalah mendeskripsikan data penelitian sesuai variabel yang akan diteliti

PENDAHULUAN

Di Negara Indonesia memiliki dua jenis pembangian wilayah yakni perkotaan dan pedesaan, namun dewasa ini masih diperhadapkan dengan permasalahan pemerataan pembangunan dan perbedaan yang menggorogoti kesejahteraan dan kemakmuran bangsa. Dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menegaskan komitmen politik bahwa negara melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan. Pengaturan desa juga dimaksudkan untuk mempersiapkan desa dalam merespon proses modernisasi, globalisasi, dan demokratisasi yang terus berkembang tanpa kehilangan jati dirinya. Penguatan dan pemberdayaan masyarakat desa tersebut sejalan dengan nawacita ketiga yaitu “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa.

Salah satu agenda besarnya adalah mengawal implementasi Undang-Undang Desa ini

telah tercermin dalam program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang diadopsi sejak tahun 2014 adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pendekatan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok masyarakat miskin yang efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat. Dengan adanya kebijakan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa diharapkan dapat berjalan dengan baik. Karena itu dimensi manajemen pada pelaksanaan kebijakan program tersebut perlu untuk diterapkan dengan baik sesuai makna karakter dari kebijakan publik.

Menurut Nugroho (2003:152) mengatakan bahwa suatu cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya yaitu dengan langsung mempraktekkan dalam bentuk program-program atau melalui formasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut. Sedangkan menurut Parker dalam Sadhana (2013:53) mengatakan bahwa kebijakan publik dapat diartikan sebagai suatu tujuan tertentu atau serangkaian asas tertentu atau tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada suatu waktu tertentu dalam kaitannya dengan suatu subjek atau sebagai respon terhadap suatu keadaan yang kritis.

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah/lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya. Juga kebijakan adalah terdiri dari pernyataan tentang sasaran dan satu atau lebih pedoman yang luas untuk mencapai sasaran tersebut sehingga dapat dicapai yang dilaksanakan bersama dan memberikan kerangka kerja bagi pelaksanaan program, sehingga hal ini dapat mendorong percepatan pembangunan perdesaan seiring dengan pertumbuhan penduduk yang cukup besar memerlukan pemerataan pembangunan secara fisik dan pemberdayaan masyarakat dalam berbagai kehidupan.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana yang tertulis dalam pasal 1 penjelasan 12 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Namun implementasi kebijakan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Kawa Kecamatan Seram Barat yang terlihat masih belum optimal, hal ini dilihat dari posisi keberagaman jenjang pendidikan tenaga pendamping yang merefleksikan kemampuannya dalam memahami permasalahan yang terjadi di desa untuk mencari solusi begitupun dengan tingkat pemahaman dalam memberikan peningkatan kapasitas kepada aparat pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan desa. Juga implementasi kebijakan yang berdampak pada program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang menunjukkan belum optimalnya terlihat berupa : kurangnya kebijakan yang mendukung, kurangnya sumber daya dan kurangnya sikap pelaksana program dalam memperlancar kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa yang merupakan bagian kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merasa tertarik untuk menelitinya

lebih lanjut dengan judul : “Implementasi Kebijakan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kawa Kecamatan Seram Barat”.

LANDASAN TEORI

1. Pengertian Kebijakan

Selain itu, menurut John Lock dalam Sadhana (2013:50) mengatakan bahwa kebijakan merupakan suatu proses dan tidak sekedar sebagai suatu system dan apabila perlu dapat dipaksakan berlakunya karena memang ada unsur kekuasaan pada pemerintah sebagai pelaku dan penggerak serta pelaksana kebijakan sehingga tercapai dan wujud tujuan beserta keputusan-keputusan lainnya dalam kebijakan tersebut sesuai dengan kepentingan masyarakat. Menurut Sagala Syaiful (2008:97) mengemukakan bahwa kebijakan adalah pernyataan atau pemahaman umum yang mempedomani pemikiran dalam pengambilan keputusan yang memiliki esensi batas-batas tertentu dalam mengambil keputusan

Dari uraian diatas dijelaskan bahwa kebijakan yang dibuat pemerintah yang mempunyai kekuatan hukum mengikat aparatur pemerintah dan masyarakat dalam rangka melaksanakan tugas umum pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan guna mengatasi permasalahan tertentu atau mencapai tujuan tertentu.

Menurut Friedrich dalam Wahab (2014:9) mengatakan kebijakan adalah sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkup tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Sedangkan menurut Widodo (2013:23) mengatakan kebijakan adalah berkaitan dengan masalah sosial dan masalah manusia, bukan pada yang dilakukan tetapi pada apa yang seharusnya dilakukan terhadap masalah publik tersebut.

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa kebijakan pada dasarnya merupakan serangkaian tindakan-tindakan yang diambil oleh pemerintah baik bersifat aktif maupun pasif untuk mengatasi masalah publik. Oleh karena itu suatu kebijakan dibuat untuk dilaksanakan, untuk itu jika sebuah kebijakan telah disahkan, tapi tidak ada manfaatnya bila kebijakan itu tidak dapat di implementasikan.

2. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses dalam kebijakan publik yang mengarah pada pelaksanaan suatu kebijakan. Praktek implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena adanya intervensi dari berbagai kepentingan. Implementasi kebijakan sesungguhnya bukan hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran biokrasi, melainkan lebih dari itu implementasi juga menyangkut masalah-masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Menurut Jones dalam Widodo (2013:86) merumuskan batasan implementasi sebagai “*a process of getting additional resources so as to figure out what is to be done*” (sebuah proses untuk mendapatkan sumber tambahan sehingga bisa mengetahui apa yang seharusnya dilakukan). Dari rumusan tersebut maka dalam implementasi memerlukan dua macam tindakan yang berurutan yaitu: (1) tindakan yang akan dilakukan, (2)

melaksanakan tindakan apa yang telah dirumuskan tadi. Sedangkan, dalam konteks implementasi kebijakan menurut Van Mater dan Horn dalam Sadhana (2013:175) mengatakan bahwa implementasi kebijakan sebagai “tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan”.

Disamping itu, dari beberapa definisi tersebut diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut 3 (tiga) hal menurut Agustino, (2014:139) yaitu :

- a. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan ;
- b. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan ; dan
- c. Adanya hasil kegiatan.

Demikian dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana implementasi kebijakan merupakan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapat hasil sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

3. Model Implementasi Kebijakan

Dalam sejarah perkembangan studi implementasi kebijakan dijelaskan tentang adanya dua pendekatan guna memahami implementasi kebijakan yaitu pendekatan *top down* dan *bottom up*. Dalam penelitian ini lebih memilih pendekatan model *top down* mengingat lebih efektif dari perspektif pelaksanaan kebijakannya, adapun model-model *top down* tersebut menurut George C. Edwar III dalam Agustino (2014:149) menamakan model implementasi kebijakan dengan *direct and indirect impact on implementation*. Dalam pendekatan yang ditetjemahkan terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu : (a) Komunikasi; (a) Sumber daya; (a) Disposisi; dan (a) Struktur birokrasi.

Adapun model implementasi kebijakan diatas dapat dijelaskan melalui variabel-variabel yang terlihat dibawah ini;

- a. Komunikasi adalah sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang mereka kerjakan.
- b. Sumberdaya adalah yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Indikator sumberdaya terdiri dari beberapa elemen yaitu ; (a) staf, (b) informasi, (c) wewenang dan (d) fasilitas.
- c. Disposisi adalah sikap dari pelaksana kebijakan mengenai pelaksana suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana suatu kebijakan harus mengetahui apa yang akan dilakukan.
- d. Struktur birokrasi adalah yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implemementasi kebijakan publik. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia.

Dengan demikian dari beberapa model implementasi kebijakan tersebut diatas merupakan model implementasi *top down* yang dapat menyentuh dan menganalisis

implementasi kebijakan program dari aspek isi kebijakan dan konteks kebijakan.

4. Pengertian Program

Program merupakan tahap-tahap dalam penyelesaian rangkaian kegiatan yang berisi langkah-langkah yang akan dikerjakan untuk mencapai tujuan dan merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi. Menurut Muhaimin dkk, (2009:349) mengatakan bahwa program merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait, untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Biasanya suatu program mencakup seluruh kegiatan yang berada di bawah unit administrasi yang sama, atau sasaran-sasaran yang saling bergantung dan saling melengkapi, yang semuanya harus dilaksanakan secara bersamaan atau berurutan.

Dari uraian diatas dijelaskan bahwa program adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok berbentuk pelaksanaan kegiatan yang didukung kebijaksanaan, prosedur, dan sumber daya dimaksudkan membawa suatu hasil untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Disisi lain, menurut Mudasir, (2012:1) mengatakan bahwa program sering dikaitkan dengan perencanaan, persiapan, dan desain atau rancangan. Desain berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata *decine*. Jadi desain dalam perspektif pembelajaran adalah rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran disebut juga dengan program pembelajaran. Disamping itu, menurut Zainal Arifin (2010:6) mengatakan bahwa program adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan, (a) realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, (b) berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan (c) terjadi dalam satu organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Dengan demikian program dapat diartikan sebagai serangkain kegiatan yang direncanakan dengan seksama dan dalam pelaksanaannya berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan banyak orang. Juga program merupakan tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu atau kelompok terhadap suatu objek atau sasaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui adanya organisasi, interpretasi dan penerapan.

5. Pembangunan dan Pemberdayaan

Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. Proses pembangunan sebenarnya adalah merupakan suatu perubahan sosial ekonomi dan budaya. Pembangunan agar dapat menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atau kekuatan sendiri tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Menurut S.P Siagian (2003:10) mendefinisikan pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Sedangkan menurut Anwar (2005:43) mengatakan bahwa pembangunan merupakan upaya yang sistematis dan berkesinambungan dan berkelanjutan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistic.

Dari uraian diatas dijelaskan bahwa pembangunan sebaiknya tidak hanya memperhatikan tujuan-tujuan sosial ekonomi dalam konteks model pembangunan

alternatif semakin berkembang luas. Persoalan-persoalan demokrasi dan hak-hak asasi manusia menjadi isu-isu penting yang mendapat perhatian serius dalam kajian-kajian pembangunan.

Dalam konteks pemberdayaan yang merupakan suatu konsep yang relatif baru dimana masyarakat tidak lagi hanya dijadikan obyek dalam pembangunan tetapi juga dijadikan subyek dari pembangunannya sendiri. Menurut Rahman Mulyawan (2016:45) mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan pembangunan alternatif atau pembangunan sosial yang bertujuan menyelenggarakan pembangunan yang lebih berkeadilan. Sedangkan menurut Nasdian (2014:96) mengatakan bahwa pemberdayaan merupakan suatu upaya menumbuhkan peran serta dan kemandirian hingga masyarakat baik di tingkat individu, kelompok, kelembagaan maupun komunitas memiliki tingkat kesejahteraan yang jauh lebih baik dari sebelumnya, memiliki akses pada sumber daya, memiliki kesadaran krisis maupun melakukan pengorganisasian dan kontrol sosial dari segala aktivitas pembangunan yang dilakukan dilingkungannya.

Dengan demikian pemahaman tentang pemberdayaan masyarakat tidak terlepas dari konteks keberdayaan masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi tergantung pada program atau bantuan, akan tetapi membuat masyarakat memiliki keyakinan yang lebih besar akan kemampuan dirinya.

6. Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, pelaksanaan biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Menurut Nurdin Usman (2002:7) mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Sedangkan menurut Abdullah Syukur (1987) mengatakan bahwa dalam proses pelaksanaan program sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu ;

- a. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan;
- b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan.
- c. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Hal ini dapat dijelaskan dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi masyarakat.

Demikian terdapat beberapa deminsi yang dapat menunjang pelaksanaan program pembagunan dan pemberdayaan adalah sebagai berikut :

- a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.
- b. Sumber daya, dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.

- c. Disposisi adalah sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program.
- d. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (*Standar Operating Procedures*), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Dengan demikian dari beberapa dimensi tersebut diatas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, sebagaimana pelaksanaan program adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok berbentuk pelaksanaan kegiatan yang didukung kebijaksanaan, prosedur, dan sumber daya dimaksudkan membawahi suatu hasil untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pelaksanaan suatu program senantiasa dapat melibatkan ketiga unsur tersebut diatas dengan tujuan agar semua pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan secara efektif dan efisien.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode yang bersifat mengemukakan fakta apa adanya, baik secara tertulis ataupun lisan, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel-variabel lain, dengan kata lain penelitian ini tidak menguji hipotesa melainkan menjelaskan dan menganalisis tentang fenomena-fenomena yang akan diteliti. Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah di Desa Kawa Kecamatan Seram Barat.

Dalam penentuan informan, maka peneliti mengambil informan kunci yaitu orang-orang yang dianggap mengetahui atau terlibat langsung mengenai masalah penelitian ini. Adapun teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisa data kualitatif dengan model Miles dan Huberman (1984) dalam yaitu : pengumpulan data; reduksi data ; penyajian data; kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam hasil dan pembahasan pada penelitian yaitu untuk menjelaskan gambaran menyangkut Implementasi Kebijakan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kawa Kecamatan Seram Barat, maka peneliti dapat melakukan observasi lapangan yang kemudian dilakukan pendekatan dan wawancara kepada informan yang hasilnya dapat diuraikan dalam hasil penelitian ini. Adapun dalam variabel penelitian ini dapat diukur melalui beberapa dimensi yaitu :

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Oleh karena itu merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Dalam proses implementasi kebijakan suatu program dalam pemerintahan, maka komunikasi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam mendukung berjalannya program tersebut. Hal ini pemerintah desa telah melakukan kegiatan sosialisasi implementasi kebijakan program pembangunan dan pemberdayaan

kepada masyarakat dan siapa saja yang terlibat proses sosialisasi, maka dilakukan pendekatan dan wawancara dengan Kepala Desa, ia mengatakan bahwa :

"Iya untuk pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan, memang sejak awal sudah dilakukan penyampaian informasi berupa dilakukan sosialisasi oleh pelaksana program, pemerintah desa dan warga masyarakat melalui musyawarah guna agar masyarakat mendapatkan informasi dengan benar sehingga pada saat program berjalan tidak ada lagi keluhan masyarakat, apalagi program ini berhubungan dengan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat misalnya rehabilitasi balai, desa, sirtu jalan tani dan rehab penampungan sumber air bersih" (Wawancara, 04 Agustus 2024).

Selain itu, dari pernyataan diatas mengenai proses penyampaian informasi program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dilakukan secara jelas oleh perangkat desa, maka hal ini dilakukan pula pendekatan dan wawancara dengan salah seorang tim pelaksana program, ia mengatakan bahwa :

"Untuk proses penyampaian informasi terkait dengan pelaksanaan program ini, memang pemerintah desa telah berupaya untuk memberikan kejelasan dan kepastian agar tidak memberikan rasa kekhawatiran yang dimiliki oleh warga masyarakat desa, adapun proses penyampaian dilakukan melalui musyawarah guna mendapatkan hasil dan mufakat antara pelaksana program, pemerintah desa dan warga masyarakat di desa setelah itu kegiatan program dapat dijalankan" (Wawancara, 05 Agustus 2024).

Selanjutnya, dilakukan pendekatan dan wawancara dengan ketua BPD mengenai alur sosialisasi sangat diperlukan dalam pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di tingkat desa, ia mengatakan bahwa :

"Iya, kalau alur komunikasi atau sosialisasi memang disadari sangat diperlukan sehingga dapat dilakukan oleh tim pelaksana program dan pemerintah desa untuk melakukan pertemuan yang melibatkan masyarakat baik formal maupun non formal untuk membicarakan masalah program yang nantinya akan dilaksanakan misalnya sosialisasi mengenai program pembuatan jalan simpan, pembangunan WC umum dan pembangunan unit air, disamping itu informasi yang disampaikan pembuatan papan informasi mengenai kegiatan program pembangunan dan pemberdayaan di tempat-tempat strategi guna diketahui oleh wagar masyarakat umum" (Wawancara, 06 Agustus 2024).

Dengan demikian menunjukan bahwa belum optimalnya pelaksanaan komunikasi dalam melaksanakan kebijakan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang terlihat berupa kurangnya sosialisasi awal yang dilakukan oleh tim pelaksana program dan pemerintah desa, kurangnya proses penyampaian informasi yang baik meskipun sudah dilakukan, dan kurangnya alur sosialisasi yang dapat disesuaikan dengan pelaksanaan program, sehingga hal ini dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan program pembangunan dan pemberdayaan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

2. Sumber daya

Sumber daya yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan dan yang menjadi tolak ukur dari sumberdaya terdiri dari beberapa elemen yaitu ; staf,

informasi, wewenang dan fasilitas guna mencapai tujuan implementasi kebijakan pada suatu kegiatan yang dilakukan. Dalam mendukung implementasi kebijakan maka sumber daya manusia menjadi sangat penting yaitu bagaimana strategi yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan (dalam hal ini kepala desa) agar bagaimana kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan efektif dengan dibantu oleh aparat-aparat desa seperti misalnya bagaimana kepala desa mengefektifkan kinerja pendamping desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan pemerintah yang akan di implememtasikan atau terkait program yang akan dijalankan agar program pembangunan dan pemberdayaan yang dapat berjalan dengan optimal. Oleh karena itu perlunya sumber anggaran pelaksanaan kebijakan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, maka dilakukan pendekatan dan wawancara dengan sekretaris desa, ia mengatakan bahwa :

"Iya, kalau untuk sumber anggaran pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan berasal dari dana desa yang kegiatannya berupa lanjutan pembangunan jalan simpang, pembangunan gedung posyandu, pembangunan saluran air got, sedangkan untuk pembangunan pagar masjid dan jalan rapat beton anggarannya bersumber dari swadaya masyarakat desa setempat untuk berpartisipasi terhadap pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan di desa" (Wawancara, 04 Agustus 2024).

Selain itu, dari pernyataan diatas mengenai kualitas staf pelaksanaa program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa telah berjalan sesuai surat keputusan, maka hal ini dilakukan pula pendekatan dan wawancara dengan salah seorang warga masyarakat, ia mengatakan bahwa :

"Kalau untuk kualitas staf pelaksana program memang berjalan sudah sesuai surat keputusan dan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tentu terlihat memang memiliki kemampuan untuk mengelola berjalannya kegiatan program, meskipun sering terjadi masalah teknis terkait dengan pengelolaan anggaran atau keterlambatan bahan yang didatangkan akibat jangkau dengan perkotaan sedikit jauh sehingga membuat pelaksanaan program memiliki keterlambatan" (Wawancara, 05 Agustus 2024).

Selanjutnya, dilakukan pendekatan dan wawancara dengan salah seorang tim pelaksana program mengenai fasilitas yang diberikan pemerintah desa dalam program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, ia mengatakan bahwa :

"Kalau untuk fasilitas yang diberikan sudah ada yang terlihat berupa fasilitas pembangunan jalan simpang, penampung air bersih, pembangunan jalan rapat beton dan pagar masjid, jadi semua pembagunan itu memiliki sumber dana yang berbeda yakni dari dana desa dan swadaya masyarakat yang diperuntungkan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan, maka dengan begitu masyarakat dapat merasakan langsung hasilnya" (Wawancara, 06 Agustus 2024).

Dengan demikian menunjukan bahwa belum optimalnya sumber daya terhadap pelaksanaan kebijakan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang terlihat berupa kurangnya sumber anggaran pelaksanaan program, kurangnya kualitas sikap pelaksana program, kurangnya fasilitas yang diberikan pemerintah desa terhadap pelaksanaan program dan dana yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan

pelaksanaan program sehingga membuat masyarakat melakukan kegiatan swadaya sebagai bentuk kegiatan pembangunan dan pemberdaya guna mewujudkan pelaksanaan program di tingkat desa.

3. Disposisi

Disposisi merupakan sikap dari pelaksana kebijakan mengenai pelaksana suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksanaan suatu kebijakan harus mengetahui apa yang akan dilakukan. Sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi kebijakan program, karena bagaimana mungkin suatu kebijakan di implementasikan apabila tidak ada yang bersedia untuk mengimplementasikan, setelah seorang implementor bersedia maka ia juga harus komitmen dengan kesediaannya sehingga kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik. Hal ini perlu adanya dukungan yang diberikan oleh setiap pelaksanaan terhadap program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, maka dilakukan pendekatan dan wawancara dengan ketua BPD, ia mengatakan bahwa :

“Untuk pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan di desa memang mendapat dukungan yang cukup tinggi dari pelaksana program selaku penanggung jawab kegiatan pembangunan dan pemberdayaan yang sedang berjalan di desa, sehingga membuat warga masyarakat memiliki inisiatif untuk turut serta terlibat dan berpartisipasi dalam mengikuti pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di desa” (Wawancara, 04 Agustus 2024).

Selain itu, dari pernyataan diatas mengenai ada respon masyarakat terhadap program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di tingkat desa, maka hal ini dilakukan pula pendekatan dan wawancara dengan salah seorang warga masyarakat, ia mengatakan bahwa :

“Iya, kalau untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan dimana masyarakat cukup memberikan respon yang baik, sehingga program kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan baik, kegiatan pembangunan tersebut sebagian juga dilakukan melalui swadaya masyarakat, disamping itu masyarakat masih terlalu berhadapan pada besarnya dana dari program tersebut, dengan tujuan agar kegiatan pembangunan dan pemberdayaan dapat berjalan sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat” (Wawancara, 05 Agustus 2024).

Selanjutnya, dilakukan pendekatan dan wawancara dengan salah seorang tim pelaksana program mengenai ada sikap timbal balik antara pelaksana dengan peserta program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di tingkat desa, ia mengatakan bahwa :

“Iya, untuk diketahui sebenarnya yang dibutuhkan untuk mengsucceskan semua program pembangunan dan pemberdayaan, cukup dengan membangun kerjasama antara warga dan pelaksana program, sebab kedua komponen ini merupakan kunci kesuksesan program, ketika dua komponen ini sering bekerjasama maka tidak akan ada yang namanya tidak tepatnya sasaran dan tujuan yang di inginkan, dan walaupun terdapat kesalahan sikap yang ditujukan oleh warga masyarakat dan pelaksana program maka sekiranya itu hanyalah kesalahan teknik dalam komunikasinya” (Wawancara, 06 Agustus 2024).

Dengan demikian menunjukan bahwa belum optimalnya disposisi atau sikap pelaksana dalam melaksanakan kebijakan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang terlihat berupa kurangnya dukungan yang diberikan terhadap pelaksanaan program, kurangnya respond yang diberikan masyarakat terhadap pelaksanaan program, kurangnya sikap timbale balik yang ditujukan oleh pelaksana program, kurangnya sikap pelayanan yang baik oleh dalam melaksanakan program, sehingga hal ini dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan program dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa melalui kegiatan pembangunan, pemberdayaan dan kegiatan sosial lainnya.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan implelementasi kebijakan publik. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia. Oleh karena itu struktur birokrasi harus memiliki *Standar Operating Procedures*, yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku. Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi *bureaucratic fragmentation* karena menjadikan struktur ini menjadi proses implementasi menjadi jauh dari dekat. Oleh karena itu program yang dilakukan oleh tim pelaksana program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa telah sesuai dengan aturan yang ada, maka dilakukan pendekatan dan wawancara dengan kepala desa, ia mengatakan bahwa :

"Kalau untuk pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh tim pelaksana program selama ini memang sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang adanya misalnya peraturan tersebut juga dibuat berdasarkan hasil keputusan musyawarah antara tim pelaksana program dan warga masyarakat setempat guna setiap program pembangunan dan pemberdayaan dapat bejalan sesuai tujuan dan sasaran kegiatan yang dilakukan dengan begitu masyarakat dapat merasakan langsung hasil dari pada program yang ada di desa berupa program pembuatan pagar masjid, jalan rapat beton, pembangunan pagar sekolah dan pembuatan saluran air bersih" (Wawancara, 04 Agustus 2024)

Selain itu, dari pernyataan diatas mengenai program yang dilakukan oleh tim pelaksana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dapat dipertanggung jawabkan oleh pemerintah setempat, maka hal ini dilakukan pula pendekatan dan wawancara dengan salah seorang tim pelaksana program, ia mengatakan bahwa :

"Iya, kalau untuk dilihat dari hasil program yang dilakukan oleh tim pelaksana program memang menunjukan memiliki hasil yang cukup baik dan memenuhi keinginan dan harapan meskipun sebagian rancangan beberapa program pembangunan dan pemberdayaan tidak terealisasi akibat keterbatasan anggaran yang tersedia, namun hal ini tidak membuat surutnya tim pelaksana program melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam menangani berjalannya program kegiatan yang sudah ada, maka dengan begitu tingkat pertanggung

jawaban yang dilakukan desa setempat dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan yang ada di desa” (Wawancara, 05 Agustus 2024).

Selanjutnya, dilakukan pendekatan dan wawancara dengan salah seorang warga masyarakat mengenai pemahaman tim pelaksana program atas sikap pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa serta adanya tanggung jawab, ia mengatakan bahwa :

“Iya, dapat diketahui bahwa tingkat pemahaman tim pelaksana program atas sikap yang ditujukan terkait dengan pelaksanaan program sudah terlihat baik, disebabkan dari semua program kegiatan yang berjalan di desa sebagian besar dapat terealisasi sesuai dengan ketentuan dan ketetapan yang ada, adapun atas hasil-hasil program tersebut menunjukkan berjalan kegiatan sesuai dengan harapan masyarakat desa setempat dan dengan begitu masyarakat dapat merasakan langsung hasilnya” (Wawancara, 06 Agustus 2024.)

Dengan demikian menunjukan bahwa belum optimalnya struktur birokrasi terhadap pelaksanaan kebijakan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang terlihat berupa pelaksanaan program tidak sesuai dengan aturan yang ada, kurangnya pertanggung jawaban pelaksana program oleh pemerintah setempat, kurangnya pemahaman dan sikap yang ditujukan oleh tim pelaksana program sebagai bentuk tanggung jawab yang dimiliki, serta tingkat pengambil keputusan terkait pelaksanaan program dilakukan tidak adil dan merata, sehingga hal ini dapat mempengaruhi pelaksanaan program dalam mewujudkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan penulis pada Bab sebelumnya Implementasi Kebijakan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kawa Kecamatan Seram Barat, maka dapat disimpulkan dari pendekatan dan hasil wawancara dengan informan melalui beberapa indikator-indikator yaitu :

a. Komunikasi

Dari hasil wawancara dengan infoman menunjukan bahwa belum optimalnya pelaksanaan komunikasi dalam melaksanakan kebijakan program yang terlihat berupa kurangnya sosialisasi awal yang dilakukan oleh tim pelaksana program dan pemerintan desa, kurangnya proses penyampaikan informasi yang baik meskipun sudah dilakukan, dan kurangnya alur sosialisasi yang dapat disesuaikan dengan pelaksanaan program.

b. Sumber daya

Dari hasil wawancara dengan infoman menunjukan bahwa belum optimalnya sumber daya terhadap pelaksanaan kebijakan program yang terlihat berupa kurangnya sumber anggaran pelaksanaan program, kurangnya kualitas sikap pelaksana program, kurangnya fasilitas yang diberikan pemerintah desa terhadap pelaksanaan program dan dana yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program.

c. Disposisi

Dari hasil wawancara dengan infoman menunjukan bahwa belum optimalnya disposisi atau sikap pelaksana dalam melaksanakan kebijakan program yang terlihat

berupa kurangnya dukungan yang diberikan terhadap pelaksanaan program, kurangnya respond yang diberikan masyarakat terhadap pelaksanaan program, kurangnya sikap timbale balik yang ditujukan oleh pelaksana program, kurangnya sikap pelayanan yang baik oleh dalam melaksanakan program.

d. Struktur Birokrasi

Dari hasil wawancara dengan informan menunjukan bahwa belum optimalnya struktur birokrasi terhadap pelaksanaan kebijakan program yang terlihat berupa pelaksanaan program tidak sesuai dengan aturan yang ada, kurangnya pertanggung jawaban pelaksana program oleh pemerintah setempat, kurangnya pemahaman dan sikap yang ditujukan oleh tim pelaksana program sebagai bentuk tanggung jawab yang dimiliki, serta tingkat pengambil keputusan terkait pelaksanaan program dilakukan tidak adil dan merata.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka peneliti dapat mencoba memberikan saran-saran sebagai berikut:

- a. Untuk menjaga keberlanjutan program di desa, maka pemerintah desa perlu merencanakan dan menyusun bentuk-bentuk kegiatan di desa sebagai upaya keberlanjutan untuk meningkatkan pembangunan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri.
- b. Perlu diterimanya masyarakat terhadap kebijakan yang dibutuhkan dalam realitas kemasyarakatan agar warga masyarakat akan lebih mengetahui, memahami, dan melibatkan diri secara langsung dalam setiap kebijakan pemerintah, tidak terkecuali terhadap keberlanjutan implementasi kebijakan.
- c. Aparatur pemerintah dan khususnya pemerintah desa dapat mengefektifkan komunikasi, sikap pelaksana dan sumber daya agar lebih fleksibel dan tidak birokratis dalam implementasi kebijakan program di wilayah desa.
- d. Implementasi kebijakan perlu dilanjutkan dimasa yang akan datang dengan tetap mempertahankan dan mentransformasikan nilai-nilai budaya masyarakat lokal yang hidup dan berkembang sebagai bingkai dan spirit dalam pembangunan daerah dan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anwar, 2005. *Pembangunan Ekonomi Daerah Berkeadilan*, Kurnia Kalam Semesta : Yogyakarta.
- [2] Agustino Leo, 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan*. Alfabeta CV. Bandung.
- [3] Muhaimin, dkk., 2009. *Manajemen Pendidikan*, Kencana : Jakarta
- [4] Mudasir, 2012, *Desain Pembelajaran*, Indragiri Hulu : STAI Nurul Falah.
- [5] Nasdian Fredian Tonny, 2014. *Pengembangan Masyarakat*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.
- [6] Nurdin Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. PT. Raja Grafindo Persada ; Jakarta.
- [7] Rahman Mulyawan, 2016. *Masyarakat, Wilayah dan Pembangunan*. Unpad Press : Bandung.
- [8] Ryant Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Elex Media Komputindo : Jakarta.

-
- [9] S.P. Siagian, 2003. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Graha Ilmu : Yogyakarta.
 - [10] Sadhana, Kridawati, 2013. *Realitas Kebijakan Publik*. Universitas Negeri Malang : Malang
 - [11] Sagala Syaiful, 2008. *Administrasi Kontemporer*. Alfabeta : Bandung.
 - [12] Wahab, S.A., 2014. *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara : Jakarta.
 - [13] Widodo, Joko, 2013. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Bayumedia Publishing : Malang
 - [14] Zainal Arifin, 2010. *Evaluasi Program. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia*. Bahan Ajar : Bandung.
 - [15] Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
 - [16] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.